

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SABU-SABU (SATU BULAN SATU BUKU) DALAM PENGUATAN LITERASI KEWARGANEGARAAN SISWA

Putri Firdasari

Universitas Pancasakti Tegal

putrifirdasari@student.upstegal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sabu-Sabu (Satu Bulan Satu Buku) dalam penguatan literasi kewarganegaraan siswa di SMA Negeri 3 Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sabu-Sabu telah dilaksanakan secara sistematis sejak Januari 2026 melalui lima tahapan kegiatan, yaitu penyediaan rak literasi, membaca mandiri, pengisian jurnal literasi, penyusunan resensi, dan presentasi-diskusi kelas. Program ini terbukti berkontribusi positif terhadap penguatan tiga aspek literasi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan (civic knowledge), keterampilan (civic skills), dan karakter kewarganegaraan (civic dispositions). Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan adanya peningkatan partisipasi membaca, pengisian jurnal literasi, kunjungan perpustakaan, dan keaktifan diskusi peserta didik. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi padatnya jadwal sekolah, perbedaan minat baca siswa, dan keterbatasan koleksi buku tematik kewarganegaraan. Simpulan, penelitian ini menegaskan bahwa pembiasaan literasi yang terstruktur merupakan instrumen efektif dalam penguatan literasi kewarganegaraan yang memerlukan sinergi antara sekolah, guru mata pelajaran, dan peserta didik.

Kata Kunci: Gerakan Literasi Sekolah, Literasi Kewarganegaraan, Program Sabu-Sabu, Studi Kasus, SMA Negeri 3 Tegal

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Sabu-Sabu Program (One Month, One Book) in strengthening students' civic literacy at SMA Negeri 3 Tegal. A descriptive qualitative method with a single case study design was employed. The results indicate that the Sabu-Sabu Program has been implemented systematically since January 2026 through five stages of activity: providing literacy shelves, independent reading, completing literacy journals, writing book reviews, and conducting class presentations and discussions. The program has proven to contribute positively to strengthening three aspects of civic literacy: civic knowledge, civic skills, and civic dispositions. Observations and documentation reveal an increase in reading participation, literacy journal completion, library visits, and student engagement in discussions. Obstacles identified include a packed school schedule, varying student

reading interests, and a limited collection of books with civic themes. In conclusion, this study affirms that fostering structured literacy habits is an effective instrument for strengthening civic literacy, requiring synergy among the school, subject teachers, and students.

Keywords: School Literacy Movement, Civic Literacy, Sabu-Sabu Program, Case Study, SMA Negeri 3 Tegal

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta demokratis. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan krusial untuk menanamkan pemahaman tentang kehidupan bernegara serta membekali peserta didik dengan ilmu dan kesadaran cinta tanah air, sehingga literasi kewarganegaraan menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat diabaikan (Kemendiknas, 2006).

Hasil studi PISA yang dirilis OECD (2023) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat rendah dalam kemampuan literasi membaca dibandingkan rata-rata internasional. Kondisi tersebut diperkuat oleh data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2022 yang masih berada pada kategori sedang. Data tersebut menegaskan urgensi penguatan literasi secara sistematis, khususnya literasi kewarganegaraan, sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) hadir sebagai respons kebijakan nasional yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLS diartikan sebagai ikhtiar yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan guna mewujudkan sekolah sebagai lembaga yang seluruh warganya memiliki budaya literasi sepanjang hayat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). GLS mendorong pembiasaan membaca, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan penguatan karakter peserta didik melalui ekosistem sekolah yang literat. Sejalan dengan itu, Winataputra (2012) mengidentifikasi tiga komponen utama literasi kewarganegaraan, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions, yang secara simultan mendukung pembentukan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.

Hasil observasi awal di SMA Negeri 3 Tegal pada Januari 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik kelas X belum memiliki pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila. Banyak peserta didik yang sekadar mengandalkan informasi dari internet tanpa pemahaman yang bermakna. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi kewarganegaraan peserta didik belum berkembang secara optimal sehingga memerlukan intervensi melalui pembiasaan yang terstruktur.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, SMA Negeri 3 Tegal mengimplementasikan Program Sabu-Sabu (Satu Bulan Satu Buku) sejak Januari 2026. Program ini mencakup lima tahapan kegiatan, yaitu penyediaan rak literasi di setiap kelas, membaca mandiri, pengisian jurnal literasi, penyusunan resensi, dan presentasi-diskusi kelas. Program ini merupakan wujud nyata implementasi GLS yang berpotensi menjadi sarana penguatan literasi kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Program Sabu-Sabu di SMA Negeri 3 Tegal; (2) mengidentifikasi kontribusinya terhadap penguatan literasi kewarganegaraan siswa dari aspek civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions; (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta (4) merumuskan rekomendasi optimalisasi program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Tegal dengan fokus pada warga sekolah yang terlibat dalam Program Sabu-Sabu. Pemilihan informan dilakukan secara purposive terhadap empat kategori informan, yaitu kepala sekolah (Istiana Herawati, S.S., M.Pd.), koordinator program (Laela Ayani), guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Sopiyatun), serta peserta didik kelas X5 dan X8.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipasi aktif, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan checklist dokumentasi yang telah divalidasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dengan membandingkan data dari ketiga sumber tersebut. Analisis data dilakukan secara induktif-tematik menggunakan model interaktif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini bertujuan menemukan pola bermakna yang menggambarkan hubungan antara implementasi Program Sabu-Sabu dan penguatan literasi kewarganegaraan peserta didik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Perencanaan Program Sabu-Sabu

Berdasarkan hasil triangulasi, Program Sabu-Sabu (Satu Bulan Satu Buku) dirancang sebagai upaya sistematis untuk menumbuhkan kebiasaan membaca peserta didik secara konsisten. Kepala sekolah menjelaskan bahwa perumusan kebijakan diawali melalui diskusi internal tim literasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk proposal program, dengan landasan kebijakan yang mengacu pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (W/IH-KS/22/5/26). Hal ini menunjukkan bahwa program tidak lahir secara spontan, melainkan melalui perencanaan terstruktur yang berpijak pada regulasi nasional, sejalan dengan pandangan Kemendikbud (2015) yang menempatkan GLS sebagai gerakan terencana untuk menumbuhkan ekosistem sekolah yang literat.

Koordinator program menguraikan secara rinci komposisi tim yang terlibat, yaitu kepala sekolah sebagai pelindung, penanggung jawab, ketua program, sekretaris, bendahara, serta empat anggota dari unsur guru. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang melalui ketua kelas sebagai penghubung kepada peserta didik, dengan sasaran program ditetapkan pada kelas X dan XI (W/LA-GK/11/5/26). Temuan ini dikuatkan oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa fasilitasi dan pembimbingan koordinator berlangsung baik dan konsisten (Obs), serta didukung oleh kelengkapan dokumentasi berupa foto sosialisasi, berita acara serah terima buku, dan jadwal semester genap 2025/2026 (D/01; D/02).

Pelaksanaan Program Sabu-Sabu

Kepala sekolah menyatakan bahwa program mulai berjalan secara resmi sejak Januari 2026 dan menunjukkan perkembangan sesuai target awal, yaitu setiap peserta didik membaca satu buku dalam satu bulan, dengan pemantauan melalui jurnal baca yang diperiksa setiap akhir bulan (W/IH-KS/22/5/26). Koordinator program menguraikan lima tahapan kegiatan inti, yaitu penyediaan rak literasi, membaca mandiri, pengisian jurnal literasi, penyusunan resensi, dan presentasi-diskusi kelas (W/LA-GK/11/5/26). Kelima tahapan tersebut sejalan dengan tahapan implementasi Gerakan Literasi Sekolah, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran, sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), yang menempatkan rutinitas membaca sebagai dasar pembentukan budaya literat di sekolah. Program Sabu-Sabu dapat diklasifikasikan sebagai bentuk implementasi tahap pembiasaan dan pengembangan GLS tersebut, karena mendorong peserta didik membiasakan kegiatan membaca pada waktu tertentu sekaligus mengembangkan kemampuan merespons bacaan secara kritis.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengamati bahwa kegiatan yang paling terlihat dampaknya adalah sesi presentasi resensi, yang terbukti meningkatkan kepercayaan diri peserta didik (W/S-GP/22/5/26). Para peserta didik menyatakan bahwa program memberikan pengalaman positif dalam membangun kebiasaan membaca dan menambah wawasan dari berbagai tema bacaan, seperti sejarah, kepemimpinan, isu sosial, pengembangan diri, dan kewirausahaan (W/M-X5/18/5/26; W/M-X8/19/5/26). Observasi mengonfirmasi bahwa partisipasi aktif siswa tergolong baik serta kemampuan mengaitkan bacaan dengan isu kewarganegaraan tergolong sangat baik (Obs). Dokumen pendukung tersedia secara lengkap, meliputi jadwal mingguan terstruktur, daftar hadir, buku literasi berisi resensi, serta foto dan video pelaksanaan program (D/03; D/04; D/05). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Kurniawan et al., (2024) bahwa Gerakan Literasi Sekolah yang diintegrasikan secara konsisten, baik melalui pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler, dapat menjadi sarana pembentukan warga negara yang demokratis di jenjang sekolah menengah atas.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung yang teridentifikasi secara konsisten meliputi komitmen kepala sekolah yang diwujudkan melalui koordinasi berkelanjutan (W/IH-KS/22/5/26), ketersediaan fasilitas literasi berupa rak kelas, koleksi perpustakaan, dan jurnal literasi (W/LA-GK/11/5/26), serta kesesuaian program dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Observasi menunjukkan bahwa sarana dan prasarana tersedia secara lengkap dan penggunaan media dinilai efektif dalam menjaga antusiasme siswa (Obs). Dokumentasi evaluasi mencatat adanya peningkatan partisipasi membaca, pengisian jurnal literasi, kunjungan perpustakaan, dan keaktifan diskusi peserta didik dari periode sebelum hingga setelah program berjalan (D/06).

Adapun faktor penghambat meliputi kendala koordinasi teknis pemantauan antarkelas, perbedaan minat baca peserta didik, padatnya jadwal kegiatan sekolah, serta keterbatasan koleksi buku tematik kewarganegaraan (W/LA-GK/11/5/26; W/M-X5/18/5/26; W/M-X8/19/5/26). Guru PPKn mencatat bahwa keterkaitan antara program dan pembelajaran PPKn masih perlu diperkuat melalui pemilihan tema bacaan yang lebih relevan dan koordinasi dengan guru mata pelajaran (W/S-GP/22/5/26). Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat (2024) yang menunjukkan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan di SMA dapat didorong melalui implementasi kurikulum, perancangan rencana pembelajaran, serta profesionalisme guru, sehingga kendala koordinasi dan keterbatasan bahan bacaan perlu segera diatasi agar dampak program lebih optimal.

Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi program dilakukan melalui jurnal literasi, hasil resensi, dan pemantauan partisipasi peserta didik. Keberlanjutan program dinilai terjamin karena didukung oleh berbagai pihak sehingga tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan (W/IH-KS/22/5/26). Laporan evaluasi tersedia secara lengkap beserta analisis SWOT dan rekapitulasi capaian program (D/07). Rencana tindak lanjut memuat tiga agenda, yaitu pengadaan buku, workshop literasi bagi guru, dan peningkatan sarana perpustakaan, yang ketiganya masih berstatus belum terlaksana pada saat penelitian dilakukan (D/08). Observasi menunjukkan bahwa antusiasme peserta didik terlihat meningkat dari satu sesi ke sesi berikutnya (Obs), yang mengindikasikan bahwa proses habituasi membaca mulai terbentuk. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian Ubaidillah (2024) yang menunjukkan bahwa program pembiasaan literasi di sekolah dapat menguatkan literasi budaya dan kewarganegaraan peserta didik secara signifikan apabila dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh seluruh warga sekolah.

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Kepala sekolah menjelaskan bahwa sekolah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila melalui pemilihan bahan bacaan dan topik diskusi yang berkaitan dengan toleransi, gotong royong, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Guru diarahkan untuk mengaitkan hasil literasi dengan materi pembelajaran sehingga peserta didik mampu memahami dan menyikapi persoalan sosial secara kritis dan bijak (W/IH-

KS/22/5/26). Guru PPKn mengamati adanya peningkatan pemahaman peserta didik terhadap hak dan kewajiban, nilai-nilai Pancasila, serta sikap demokratis (W/S-GP/22/5/26). Kondisi ini menggambarkan terbangunnya literasi kewarganegaraan peserta didik, yang menurut Dwipayana (2013) merupakan kapasitas warga negara untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dinamika politik serta giat berpartisipasi dalam kelompok maupun masyarakat secara lebih luas; sejalan pula dengan Suryadi (2010) yang menekankan bahwa literasi kewarganegaraan adalah pemahaman dan kecakapan warga negara dalam menyikapi serta menyelesaikan isu sosial, politik, dan ketatanegaraan.

Para peserta didik menunjukkan pemahaman yang kontekstual tentang nilai-nilai Pancasila, misalnya sila keempat dikaitkan dengan musyawarah OSIS, sila kedua dengan etika bermedia sosial, sila ketiga dengan persatuan di tengah polarisasi, sila kelima dengan ketimpangan fasilitas pendidikan, dan sila pertama dengan toleransi antarumat beragama (W/M-X5/18/5/26; W/M-X8/19/5/26). Observasi menilai bahwa kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban dengan merujuk pada konstitusi tergolong sangat baik (Obs). Temuan ini sejalan dengan Branson, sebagaimana dikutip dalam Winataputra (2015), yang menyatakan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) meliputi pemahaman tentang struktur pemerintahan, proses politik, konstitusi dan hukum, hak serta kewajiban warga negara, dan fungsi warga negara dalam sistem demokrasi. Dokumen RPP dan silabus PPKn, hasil ulangan, portofolio analisis isu, serta jurnal refleksi tersedia sebagai bukti capaian (D/09; D/10; D/11; D/12).

Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Kepala sekolah mengamati peningkatan nyata pada aspek disiplin, keaktifan diskusi, kepercayaan diri, kemampuan berargumentasi, dan jiwa kepemimpinan peserta didik (W/IH-KS/22/5/26). Koordinator program menjelaskan bahwa keterampilan analitis berkembang melalui tahapan membaca dan menyusun resensi, yang mendorong peserta didik untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang (W/LA-GK/11/5/26). Guru PPKn mengamati perubahan strategis dalam pembelajaran, yaitu kelas yang kini lebih berbasis diskusi, studi kasus, dan debat argumentatif (W/S-GP/22/5/26).

Peserta didik menunjukkan keterampilan analisis terhadap berbagai isu, seperti penggusuran warga, kesenjangan akses pendidikan, penyebaran hoaks, apatisme politik pemuda, distribusi zakat, dan kesenjangan infrastruktur desa-kota, dengan memanfaatkan sumber informasi yang kredibel (W/M-X5/18/5/26; W/M-X8/19/5/26). Observasi menilai kemampuan berpikir kritis sekaligus santun, inisiatif mandiri, praktik nilai demokrasi, dan kerja kelompok tanpa dominasi individu, yang seluruhnya tergolong sangat baik (Obs). Temuan ini konsisten dengan pandangan Cogan & Derricott (2000) bahwa keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan intelektual seperti berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah, serta keterampilan partisipasi seperti berkomunikasi, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang memungkinkan

warga negara terlibat secara efektif dalam berbagai proses sosial. Hal ini juga sejalan dengan Patrick sebagaimana dikutip Winataputra (2012) bahwa civic skills menjadi salah satu komponen utama literasi kewarganegaraan yang esensial bagi partisipasi aktif peserta didik. Foto dan video diskusi, portofolio analisis isu, poster, esai, dan infografis tersedia sebagai bukti pendukung (D/13; D/14; D/15).

Sikap dan Disposisi Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*)

Kepala sekolah menjelaskan bahwa program memperkuat komitmen peserta didik terhadap nilai kebhinekaan melalui pembiasaan membaca dan mendiskusikan bacaan bertema toleransi dan keberagaman. Perubahan sikap yang terlihat meliputi peningkatan disiplin, kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama (W/IH-KS/22/5/26). Koordinator program menguraikan bahwa sikap integritas berkembang melalui pembiasaan membaca mandiri dan menyusun resensi berdasarkan pemahaman sendiri (W/LA-GK/11/5/26). Guru PPKn mengamati adanya perubahan kepedulian sosial yang cukup nyata pada peserta didik (W/S-GP/22/5/26).

Peserta didik menunjukkan partisipasi sosial yang aktif dan konkret, seperti bakti sosial OSIS, donor darah, relawan pengajar, program literasi bagi adik kelas, pengembangan ide pelaporan fasilitas publik, dan kampanye peduli lingkungan di komunitas pemuda (W/M-X5/18/5/26; W/M-X8/19/5/26). Observasi menunjukkan bahwa siswa secara konsisten menghargai perbedaan, tidak menunjukkan sikap meremehkan, dan tanggung jawab kelompok terbagi secara merata tanpa pelanggaran selama observasi berlangsung (Obs). Sejalan dengan Branson sebagaimana dikutip dalam Winataputra (2015), karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) mencakup sikap dan nilai seperti tanggung jawab, integritas, toleransi, menghargai keberagaman, kepedulian pada kepentingan umum, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, yang menjadi landasan bagi terwujudnya partisipasi warga negara yang konstruktif di tengah masyarakat. Jurnal refleksi, foto kegiatan sosial, arsip karya, dan rubrik penilaian sikap tersedia sebagai bukti pendukung (D/09; D/15; D/17; D/18).

Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini sejalan dengan tujuan literasi kewarganegaraan menurut Winataputra (2015), yaitu membantu warga negara dalam memaknai dan menghargai nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945, melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghormati keberagaman, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat demokratis yang berkeadilan. Implementasi Program Sabu-Sabu yang dilaksanakan secara konsisten, didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah, koordinasi tim program, serta keteladanan dan pendampingan guru, berperan penting dalam menumbuhkan ketiga aspek literasi kewarganegaraan tersebut, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions (Winataputra, 2012).

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti perbedaan minat baca peserta didik, padatnya jadwal sekolah, serta keterbatasan koleksi buku tematik kewarganegaraan. Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa Program Sabu-Sabu perlu dikembangkan secara lebih kontekstual dan aplikatif,

khususnya melalui integrasi yang lebih sistematis dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pemilihan bahan bacaan yang secara eksplisit memuat cakupan materi PKn sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, seperti persatuan dan kesatuan bangsa, norma dan hukum, hak asasi manusia, serta nilai-nilai Pancasila, akan meningkatkan relevansi dan dampak program terhadap literasi kewarganegaraan peserta didik (Kemendiknas, 2006).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Sabu-Sabu (Satu Bulan Satu Buku) di SMA Negeri 3 Tegal telah diimplementasikan secara sistematis sejak Januari 2026 melalui struktur tim yang jelas, landasan kebijakan yang kuat, dan lima tahapan kegiatan yang terstruktur, yaitu penyediaan rak literasi, membaca mandiri, pengisian jurnal literasi, penyusunan resensi, dan presentasi-diskusi kelas.

Program ini terbukti berkontribusi positif terhadap penguatan tiga aspek literasi kewarganegaraan peserta didik. Dari aspek pengetahuan, peserta didik mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu nyata secara kontekstual. Dari aspek keterampilan, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif peserta didik berkembang secara signifikan. Dari aspek karakter, disposisi kewarganegaraan terwujud dalam bentuk partisipasi sosial yang nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Faktor kunci keberhasilan program meliputi komitmen dan kepemimpinan kepala sekolah, koordinasi tim program yang terstruktur, keteladanan dan pendampingan guru, ketersediaan fasilitas literasi, serta partisipasi aktif peserta didik. Adapun faktor penghambat meliputi padatannya jadwal sekolah, perbedaan minat baca siswa, dan keterbatasan koleksi buku tematik kewarganegaraan. Oleh karena itu, penguatan implementasi program perlu terus dilakukan, khususnya melalui: (1) peningkatan koordinasi antara koordinator program dan guru PPKn dalam pemilihan tema bacaan berbasis isu kewarganegaraan; (2) pengembangan koleksi buku tematik yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi; serta (3) pelaksanaan agenda tindak lanjut yang telah direncanakan, yaitu pengadaan buku, workshop literasi bagi guru, dan peningkatan sarana perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cogan, J. J., & Derricott, R. (2000). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. Kogan Page
- Dwipayana, A. A. G. (2013). *Membangun Civic Literacy dalam Penguatan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE Press
- Hidayat, R. (2024). Pelaksanaan Literasi Kewarganegaraan Siswa Di SMA Kabupaten Simeulue Dalam Era Globalisasi. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(1), 63-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/pedagogi.v24i1.1976>
- Kemendiknas. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniawan, M. W., Darmawan, C., Sapriya, S., & Syaifullah, S. (2024). Gerakan Literasi Sekolah dalam Upaya Membentuk Warga Negara Demokratis Peserta Didik Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 151-162. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/10317>
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results* (Volume I). OECD Publishing
- Suryadi, K. (2010). *Kewarganegaraan Multikultural*. Bandung: Yayasan Iqra
- Ubaidillah, F. (2024). *Penguatan Literasi Budaya dan Kewarganegaraan Siswa Melalui Program Pembiasaan Sekolah di MIN 1 Kota Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78327>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-Epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka